

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korea Selatan merupakan sebuah negara di Asia Timur yang secara geografis meliputi bagian selatan Semenanjung Korea, dengan ibu kota Seoul. Batas wilayah sebelah utara adalah Korea utara yang pernah menjadi satu negara hingga tahun 1948. Sebelah barat adalah Laut Kuning, kemudian berbatasan dengan Laut Jepang yang biasa disebut sebagai Laut Timur oleh orang-orang Korea. Korea Selatan adalah negara yang pernah menjadi objek imperialisme Jepang. Sejarah pendudukan Korea oleh Jepang dimulai pada tahun 1905 setelah Perang antara Rusia dan Jepang. Pada tahun 1910, Tokyo secara resmi menganeksasi seluruh Semenanjung. Korea merdeka setelah Jepang menyerah kepada Amerika Serikat pada tahun 1945. Setelah Perang Dunia II, pemerintahan yang berdasarkan demokrasi-(Republik Korea, ROK) didirikan di bagian selatan Semenanjung Korea sementara pemerintah komunis diterapkan di utara (Republik Demokratik Rakyat Korea, DPRK). Selama Perang Korea (1950-1953), tentara AS dan pasukan PBB berjuang bersama tentara ROK untuk membela Korea Selatan dari invasi DPRK yang didukung oleh Cina dan Uni Soviet.<sup>1</sup>

Korea merupakan negara yang terus-menerus diperebutkan oleh Cina, Jepang dan Rusia, karena memiliki letak yang strategis. Perebutan wilayah itu berhenti setelah Jepang berhasil menguasai Korea (1910-1945). Ketika itu pula

---

<sup>1</sup> EAST & SOUTHEAST ASIA- Korea, South “*Introduction and Geography*” The World FactBook dalam <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ks.html>. Diakses pada 5 April 2016

Kerajaan Choson dan kedaulatan bangsa Korea berakhir. Selama 35 tahun Korea menjadi jajahan Jepang. Pengakuan dunia internasional atas intervensinya ke Korea diperoleh Jepang melalui kemenangannya dalam perang melawan Cina (1894-1895) dan Rusia (1904-1905). Lebih jauh, Jepang memantapkan posisi pendudukannya di Korea di mata dunia internasional dengan membentuk aliansi Inggris-Jepang pada tahun 1902 dan menandatangani nota kesepakatan dengan Amerika dalam perjanjian Taft-Katsura pada tahun 1905.<sup>2</sup>

Korea mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1945 setelah Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pasca kemerdekaan hubungan Korea dan Jepang berlanjut pada hubungan diplomatik setelah pemisahan Korea, Jepang dan Republik Korea (ROK) menjalin hubungan diplomatik pada Desember 1965, dibawah Perjanjian tentang Hubungan-Hubungan Dasar antara Jepang dan Republik Korea, dengan Jepang mengakui Korea Selatan sebagai satu-satunya pemerintahan sah di semenanjung Korea.<sup>3</sup>

Hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang mencapai titik baru ketika pada tahun 1998 Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung dan Perdana Menteri Jepang Keizo Obuchi menandatangani *The Joint Declaration on a New Japan-South Korea Partnership Towards the Twenty-First Century*. Deklarasi bersama ini dibangun atas inisiatif untuk mengatasi kesenjangan persepsi sejarah dan memperluas hubungan ekonomi dan politik.<sup>4</sup> Hubungan bilateral Korea Selatan

---

<sup>2</sup> Yang Seung-Yoon dan Nur Aini Setiawati, (2003), *Sejarah Korea Sejak Awal Abad Hingga Masa Kontemporer*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 136

<sup>3</sup>The World FactBook *Op.Cit.*

<sup>4</sup>James L. Schoff, Duyeon Kim, November 2015, CARNEGIE Endowment For International Peace, "Getting Japan-South Korea Relation Back On Track" dalam <http://carnegieendowment.org/2015/11/09/getting-japan-south-korea-relations-back-on-track-pub-61918> Diakses pada 24 Oktober 2016

dan Jepang terus dijaga keharmonisannya dengan melakukan berbagai kerjasama bilateral, baik dalam bidang ekonomi, politik hingga kebudayaan.

Sebagai dua negara terkuat di Asia dan paling maju demokrasinya, Korea Selatan dan Jepang dapat memainkan peran utama dalam membentuk kembali politik di kawasan itu. Persamaan umum ke dua negara yang sama-sama menerapkan nilai-nilai liberal, supremasi hukum, kebebasan pers, dan sejenisnya dapat membentuk pusat gravitasi baru di Asia. Dengan kepercayaan yang cukup dan dengan pengalaman yang terus tumbuh, Korea Selatan dan Jepang dapat bekerja sama dengan sekutu mereka yakni Amerika Serikat untuk menegakkan tatanan aturan yang berbasis di Asia, yang telah memberikan keamanan dan stabilitas selama beberapa dekade. Korea Selatan dan Jepang juga dapat membantu mendorong penerapan demokrasi di negara lainnya di Asia, seperti negara liberalisasi baru Myanmar, dan mendorong negara yang telah berpaling dari demokrasi, seperti Thailand, untuk kembali ke prinsip-prinsip liberal.<sup>5</sup>

Selain itu Korea Selatan dan Jepang sangat bergantung pada sistem perdagangan global yang handal dan terbuka untuk memberikan stabilitas keuangan dan sumber daya. Ke dua negara telah memperoleh manfaat besar dari lembaga regional dan internasional, dari perdagangan bilateral yang diperluas (\$ 224.000.000 pada tahun 1965 menjadi \$ 84 miliar 2014), dan dari perlindungan inovasi dan hak kekayaan intelektual teknologi, antara keuntungan lain dari tatanan aturan berbasis liberal. Ke dua negara juga berbagi kepentingan nasional dalam melindungi sumber daya dan lingkungan dari efek buruk globalisasi dan

---

<sup>5</sup>Michael Austin, Desember 2015, "A new era in South Korean–Japanese relations begins" American Enterprise Institute dalam <https://www.aei.org/publication/a-new-era-in-south-korean-japanese-relations-begins/>. Diakses pada 24 Oktober 2016

modernisasi untuk mengarahkan ke arah pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di masa depan. Kepentingan global yang memiliki tantangan besar dan juga resiko tinggi dan menyoroti nilai kerjasama bilateral serta kepemimpinan, isu-isu tersebut dapat membantu menangkalkan kecenderungan masing-masing negara untuk meremehkan nilai strategis ke dua negara.<sup>6</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan isu *Japan's new security bills*, pada tanggal 16 Juli 2015, majelis rendah Jepang menyetujui undang-undang keamanan yang didukung oleh Perdana Menteri Shinzo Abe, langkah menuju kodifikasi yang menjadi salah satu perubahan terbesar dalam postur keamanan Jepang sejak akhir Perang Dunia II. Terutama, undang-undang keamanan ini akan mengizinkan Pasukan Bela Diri Jepang untuk terlibat dalam *collective self-defense*. Bisa ditebak, undang-undang (yang masih harus disetujui oleh majelis tinggi Jepang) telah memicu reaksi keras dari tetangga regional Cina, yang sudah sangat waspada terhadap tanda-tanda bahwa Jepang berusaha untuk melakukan remilitarisasi.<sup>7</sup> Hingga akhirnya Pada September 2015, Komite Parlemen Jepang telah mengesahkan undang-undang yang kontroversial mengenai *Japan's new security bills* tersebut. Pengesahan undang-undang ini memperbolehkan Jepang untuk memperluas peran militernya. Undang-undang ini disahkan meskipun terjadi beberapa bentrokan dalam parlemen.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>CARNEGIE Endowment For International Peace *Op.Cit*

<sup>7</sup>Justin McCurry, September 2015, "*Japanese soldiers could fight abroad again after security bill passed*," TheGuardian News dalam <http://www.theguardian.com/world/2015/sep/18/japanese-soldiers-could-fight-abroad-again-after-security-bill-passed#>. Diakses pada 05 April 2016

<sup>8</sup>Kim Min-ji, report September 19 2015, "*PRIME TIME NEWS 22:00 Japan passes controversial security bills as protests rage on*," ARIRANG TV NEWS dalam <https://www.youtube.com/watch?v=qkrROONM6hc>. Diakses pada 3 April 2016

Pemerintahan Shinzo Abe mengklaim pemberlakuan *Japan's New Security Bills* ini memiliki tujuan positif baik untuk di dalam maupun luar negeri. Tujuan dalam negeri yaitu untuk menjaga keamanan dan integritas Jepang, sementara tujuan luar negeri adalah untuk berkontribusi pada stabilitas keamanan dan perdamaian dunia. Kontribusi pada stabilitas keamanan dan perdamaian dunia merupakan pilar penting dari kebijakan luar negeri Jepang, dan Abe menghormati permintaan masyarakat internasional yang menginginkan Jepang untuk bisa lebih berkontribusi bagi keamanan dunia dengan mempromosikan kontribusi proaktif Jepang untuk perdamaian internasional melalui pemberlakuan *Japan's New Security Bills*. Dengan pemberlakuan *Japan's New Security Bills* ini militer Jepang dapat berkontribusi salah satunya pada aktivitas *peace keeping* dan penyediaan dukungan logistik saat melakukan *collective-defense* untuk mengatasi situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, berdasarkan resolusi PBB atau konsensus internasional lainnya.<sup>9</sup>

Amerika Serikat dan ahli keamanan barat sendiri menyambut dengan baik kebijakan baru Undang-undang keamanan Jepang yang memperbolehkan militer Jepang untuk lebih aktif berpartisipasi untuk keamanan regional, dan tentu saja dapat membantu mengawasi Cina dan militernya di Laut Cina Selatan dan mendorong Jepang untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam aliansi keamanan mereka. Ahli kajian strategi Asia, Keith Henry menganalogikan Jepang sebagai "anak berusia 42 tahun yang masih tinggal di ruang bawah tanah Amerika Serikat," dan mengatakan bahwa dengan mengadopsi undang-undang keamanan

---

<sup>9</sup> Akiyama, Masahiro, August 08 2015, "*The Objectives of Japan's New Security Legislation*," The Tokyo Foundation dalam <http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2015/objectives-of-new-security-legislation> Diakses pada 21 November 2016

yang baru membuat Jepang akhirnya “tumbuh” dan bergerak di luar konsep perdamaian dan demokrasi yang tidak lagi dipraktikkan karena hasil yang diberikan perubahan cepat pada lanskap geopolitik saat ini. "Namun, anak-anak berusia 42 tahun cenderung tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik di "dunia nyata. " Jepang akan mengalami kesulitan memenuhi tanggung jawab baru yang dibawa oleh postur keamanan proaktif baru.

Disisi lain reinterpretasi undang-undang keamanan Jepang menimbulkan berbagai reaksi dari wilayah regional yaitu Korea Selatan dan Cina. Cina dengan terang-terangan menyebut gagasan reinterpretasi undang-undang keamanan Jepang sebagai sebuah skenario mimpi buruk dan noda gelap untuk Jepang.<sup>10</sup> Sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara Kementrian Luar Negeri Cina Hua Chunying,

*“Due to historical reasons, Japan’s moves in the military and security field are closely watched by its Asian neighbors and the international community. The approval of the new security bills by Japan’s House of Representatives is an unprecedented move since the Second World War, and may lead to significant changes in Japan’s military and security policies. It is fully justified to ask if Japan is going to give up its exclusively defense-oriented policy or change the path of peaceful development that has been long pursued after the Second World War. We notice that there is also strong objection to the new security bills within Japan. This year marks the 70th anniversary of the victory of the Chinese People’s War of Resistance Against Japanese Aggression and the World Anti-Fascist War. At such a moment when people around the world memorize history and hope for peace, we solemnly urge the Japanese side to draw hard lessons from history, stick to the path of peaceful development, respect the major security*

---

<sup>10</sup> Shannon Tiezzi, July 17 2015, “Cina: Japan Security Legislation a 'Nightmare Scenario',” The Diplomat Magazine dalam <http://thediplomat.com/2015/07/Cina-japan-security-legislation-a-nightmare-scenario/>. Diakses Pada 5 April 2016

*concerns of its Asian neighbors, and refrain from jeopardizing Cina's sovereignty and security interests or crippling regional peace and stability.*"<sup>11</sup>

Sejalan dengan Cina, Korea Selatan juga memiliki respon yang negatif terhadap pemberlakuan *Japan's new security bills*. Pemerintah Korea Selatan merespon dengan cepat pemberlakuan *Japan's new security bills* pada 19 September 2015, menekankan bahwa pemerintah Korea Selatan tidak akan mentolelir berbagai macam tindakan militer oleh Jepang di Semenanjung Korea tanpa persetujuan pemerintah Korea Selatan.

Respon diberikan oleh Perdana Menteri Korea Selatan Hwang Kyo-ahn yang mengatakan pasukan pertahanan diri Jepang hanya bisa maju atau memasuki semenanjung Korea setelah berkonsultasi dengan pemerintah Korea.

*"Japan's self-defense forces will be able to enter the Korean Peninsula in consultation with the Korean government."*

Perdana Menteri Korea Selatan Hwang Kyo-ahn saat sesi interpelasi pada hari Rabu 14 Oktober 2015 mengatakan militer Jepang bisa maju ke semenanjung Korea setelah berkonsultasi dengan pemerintah dalam kasus situasi tak terelakkan dan dalam batas-batas yang diperlukan. Hwang juga menekankan, bagaimanapun, sikap prinsip Korea Selatan adalah bahwa militer Jepang tidak diizinkan untuk memasuki semenanjung tanpa persetujuan pemerintah, serta tidak ada militer

---

<sup>11</sup>Cina Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying, July 2015, *"Remarks on Japan's House of Representatives Approving New Security Bills,"* Ministry of Foreign Affairs of The People's Republic of Cina dalam [http://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/xwfw\\_665399/s2510\\_665401/2535\\_665405/t1281847.shtml](http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/t1281847.shtml). Diakses pada 5 April 2016

asing manapun bisa datang ke wilayah Korea tanpa izin pemerintah Korea Selatan.<sup>12</sup>

Dengan latar belakang hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang pasca pembentukan hubungan diplomatik tahun 1965 serta deklarasi tahun 1998 yang terus diperbaiki dan dijaga keahormornisannya, serta tujuan pemberlakuan *Japan's New Security Bills* yang memiliki dampak positif untuk keamanan dunia, memunculkan pertanyaan mengapa Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang terbentuk adalah ***“Mengapa Korea Selatan Merespon Negatif Japan's New Security Bills?”***

## **C. Kerangka Dasar Pemikiran**

Untuk menganalisa permasalahan, penelitian ini membutuhkan sebuah konsep dan teori. Mohtar Mas'ood menyatakan bahwa konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu. Mohtar Mas'ood menyimpulkan bahwa suatu konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan serta dalam ilmu sosial konsep menunjuk pada sifat-sifat dari obyek yang dipelajarinya misalnya, orang, kelompok, negara, atau organisasi internasional yang relevan bagi studi

---

<sup>12</sup>Coonie Kim, report October 14 2015, *“Japan's self-defense forces will be permitted to enter Korean peninsula under consultation”* ARIRANG TV NEWS dalam <https://www.youtube.com/watch?v=800npdCwZMY> Diakses pada 25 Oktober 2016

tertentu.<sup>13</sup>Selanjutnya, teori menurut Mohtar Mas' oed bukanlah sebuah dugaan. Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan “mengapa.” Artinya berteori adalah upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi. Selain itu sebagai sarana eksplanasi, teori adalah yang paling efektif untuk digunakan, teori juga membantu dalam mengorganisasikan dan menata fakta yang diteliti. Untuk menganalisa permasalahan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis akan menggunakan konsep kepentingan nasional dan teori pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

### **Konsep Kepentingan Nasional**

Menjadi sebuah konsep yang penting dalam hubungan internasional, konsep kepentingan nasional memiliki banyak keterkaitan penting dengan kebijakan luar negeri. Menurut Reynolds,<sup>14</sup>

*“Foreign policy consist of a range of actions taken by varying sections of the government of a state. The actions are taken with reference to other bodies acting on the international stage, of which the most important are other states, but which include, as we have seen, international, supranational, and transnational groups, and occasionally also individuals.”*

Selanjutnya Reynolds menyatakan bahwa kepentingan nasional adalah basis dari pembentukan kebijakan luar negeri. Berbagai kebijakan luar negeri ini diambil dengan memiliki tujuan. Lebih jauh Reynolds mengelaborasi bahwa tingkah laku negara dalam lingkungan internasional seharusnya merupakan

---

<sup>13</sup>Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, 1990, Yogyakarta : LP3ES, hal.93-94

<sup>14</sup> Rumki Basu, *International Politics : Concepts, Theories and Issues*, 2012, India : SAGE Publications, hal. 57

tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan tujuan-tujuan tersebut biasanya merupakan cerminan dari konsep kepentingan nasional.<sup>15</sup>

Dalam buku Mohtar Mas'oeed yang berjudul Ilmu Hubungan Internasional ; Disiplin dan Metodologi, disebutkan bahwa konsep kepentingan nasional adalah konsep dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Buku ini juga menjelaskan pemikiran Hans J. Morgenthau mengenai pandangannya terhadap konsep kepentingan nasional. Menurut salah satu tokoh *realist* ini kepentingan nasional harus menjadi dasar dalam strategi diplomasi untuk mencapai suatu tujuan negara, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya.<sup>16</sup>

Selanjutnya, Konsep kepentingan nasional oleh Jack C. Plano dan Roy Olton diberi batasan sebagai berikut:

“Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan (*Decision Making*) dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum dan merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi Negara untuk mencakup kelangsungan hidup bangsa dan Negara, kemerdekaan, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi”.<sup>17</sup>

Adapun elemen-elemen dari kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton mencakup pertahanan diri (*self preservation*), Kemandirian (*Independence*), integritas teritorial (*territorial integrity*), kemandirian militer, dan kemakmuran ekonomi (*economic wellbeing*).

---

<sup>15</sup>*Ibid*, Hal. 57

<sup>16</sup> Mohtar Mas'oeed, *Op. Cit.* Hal. 139-141

<sup>17</sup>Jack C. Plano dan Roy Olton, (1969). *International Relations Dictionary USA: Rinehart and Wingston*hal 128.

Dalam kasus Korea Selatan yang merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*, dapat dipastikan keputusan tersebut dipengaruhi oleh adanya kepentingan nasional Korea Selatan. Kepentingan nasional yang ingin dilindungi pemerintah Korea Selatan adalah kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, hingga kesejahteraan ekonomi. Dengan kondisi politik domestik Korea Selatan yang kurang stabil pada masa pemerintahan Presiden Park Geun-Hye karena banyaknya skandal politik yang terjadi, menjadikan Korea Selatan khawatir instabilitas tersebut berdampak pada stabilitas negara Korea Selatan secara umum. Serta Korea Selatan masih memiliki trauma mendalam terhadap imperialisme Jepang, pemerintah Korea Selatan berusaha untuk selalu melindungi kemerdekaan yang telah diraih serta keutuhan wilayah, keamanan militer, hingga kesejahteraan ekonominya. Kepentingan nasional tersebut secara otomatis mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dalam isu *Japan's New Security Bills*.

### **Teori Pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri**

Dalam bukunya yang berjudul *Introductions to International Politics*, William D. Coplin mengatakan bahwa suatu negara pasti akan memutuskan kebijakan luar negerinya berdasarkan dengan apa yang menjadi kepentingan nasional negara tersebut. Terdapat beberapa aspek yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum suatu negara mengambil keputusan terhadap suatu isu.<sup>18</sup> Dalam bukunya William D. Coplin menggunakan analisa pendekatan rasionalitas.

---

<sup>18</sup> William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis [Introduction to international politics: a theoretical overview]*, 1992, Mercedes Marbun, Trans., 2nd Edition, Bandung: Sinar Baru

Pendekatan rasionalitas menekankan bahwa suatu negara adalah aktor untuk mencapai suatu kepentingan atau tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional itu negara harus mengkalkulasikan secara rasional setiap aspek dalam kancan politik global. Pada pendekatan ini, politik luar negeri yang dilakukan oleh sebuah negara merupakan respon terhadap apa yang dilakukan oleh negara lain. Pendekatan ini mencoba untuk menganalisa setiap respon apa saja yang akan dilakukan suatu negara sebagai bentuk dari perhitungan yang rasional.<sup>19</sup> Menurut Coplin setiap kebijakan luar negeri yang diberikan dapat dilihat sebagai hasil dari tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara (negara pengambil keputusan). Yang pertama adalah politik dalam negeri dalam kebijakan negara- negara pengambil keputusan. Yang kedua adalah kemampuan ekonomi dan militer negara. Yang ketiga adalah konteks internasional, posisi tertentu di mana suatu negara menemukan jati dirinya khususnya mengenai hubungannya dengan negara lain dalam suatu sistem.

Tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara<sup>20</sup> :

1. Situasi politik domestik, bahwa politik dalam negeri hanyalah seperangkat determinan yang bekerja dalam politik luar negeri negara-negara. Walaupun keterbukaan suatu sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri yang dialami oleh sistem itu bisa membentuk aspek-aspek politik luar negeri tertentu.

---

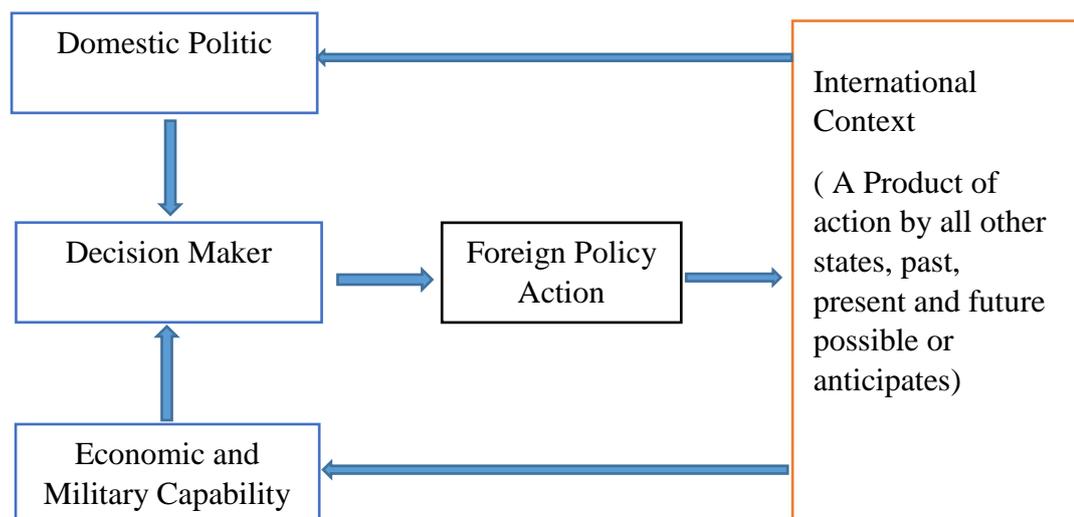
<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*

2. Situasi ekonomi dan militer, bahwa suatu negara harus memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negerinya. Termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan.
3. Konteks Internasional, bahwa ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis, dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang ditematinya dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam suatu sistem, dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara suatu negara dengan negara-negara lainnya.

Berikut penggambaran tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

**Bagan 1. Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri Menurut William D. Coplin<sup>21</sup>**



<sup>21</sup>*Ibid.*

Bagan diatas menggambarkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri, khususnya politik dalam negeri. Kondisi politik domestik bisa hanya dipahami sebagai sistem pemerintahan yang diadopsi oleh negara bersangkutan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri adalah kemampuan ekonomi dan militer. Panjang perdebatan tentang mana yang lebih penting antara kemampuan ekonomi dan militer negara membuat kedua faktor berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Akhirnya, Coplin menyebutkan konteks internasional sebagai faktor ketiga yang harus dipertimbangkan oleh pelaku dan pengambil keputusan kebijakan luar negeri.<sup>22</sup>

Dalam permasalahan Korea Selatan yang merespon negatif *Japan's New Security Bills*, hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi politik domestik Korea Selatan yang mengalami instabilitas dalam hal demokrasi. Demokrasi menjadi tantangan terbesar Korea Selatan pada tahun 2015, sejak pemerintahan Park Geun-Hye yang dimulai pada Februari 2013 tingkat demokrasi politik memerlukan perhatian khusus dan dapat dikatakan bahwa demokrasi liberal Korea Selatan berada dibawah ancaman. Serangkaian skandal politik telah menimbulkan keraguan atas mandat demokratis Partai Saenuri dan kepresidenan Park Geun-Hye, seperti dugaan intervensi Badan Intelijen Nasional dalam pemilihan presiden 2012 dalam mendukung Park Geun-Hye. Sudah bukan rahasia di Korea Selatan bahwa pemerintah konservatif telah menggunakan masalah keamanan untuk tujuan politik dalam negeri. Ditambah beberapa prasangka tentang administrasi Park Geun-Hye menyalahgunakan agenda keamanan untuk menyamarkan kinerja

---

<sup>22</sup>*Ibid*

politik yang buruk. Dari awal masa jabatannya, banyak calon untuk posisi kunci pemerintah - termasuk perdana menteri - belum melewati proses dengar pendapat parlemen atau harus berhenti dari jabatan karena tersandung skandal seks maupun politik. Selain itu daftar tugas diplomatik termasuk hubungan yang lamban atau memburuk dengan Kim Jong-un (Korea Utara), hubungan memburuk dengan Shinzo Abe (Jepang) dan menghadapi dilema dinamika Cina-AS.<sup>23</sup>

Selanjutnya melihat ke faktor kondisi ekonomi dan militer, Korea Selatan merupakan negara dengan Ekonomi terbesar peringkat ke-13 di Dunia dengan PDB yang relatif tinggi per kapita. Memiliki ekonomi yang kuat, diversifikasi dan memiliki industri dan basis manufaktur yang sangat kompetitif secara internasional. Tetapi, pada akhir 2014 Korea Selatan menghadapi perlambatan ekonomi, populasi yang menua, memburuknya ketimpangan sosial-ekonomi, meningkatnya pengangguran kaum muda, banyaknya utang rumah tangga dan kemerosotan pasar *real-estate*.<sup>24</sup>

Serta dari segi militer berdasarkan analisa Global Firepower (GFP) kekuatan militer Korea Selatan masih lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan militer Jepang, sehingga Korea Selatan mengkhawatirkan segala bentuk *collective-defense* militer Jepang yang berpotensi dilakukan di wilayah semenanjung Korea. Dari konteks internasional, Korea Selatan pernah menjadi objek imperialisme Jepang dari tahun 1910 hingga tahun 1945 yang mengakibatkan trauma mendalam bagi Korea Selatan. Imperialisme Jepang di

---

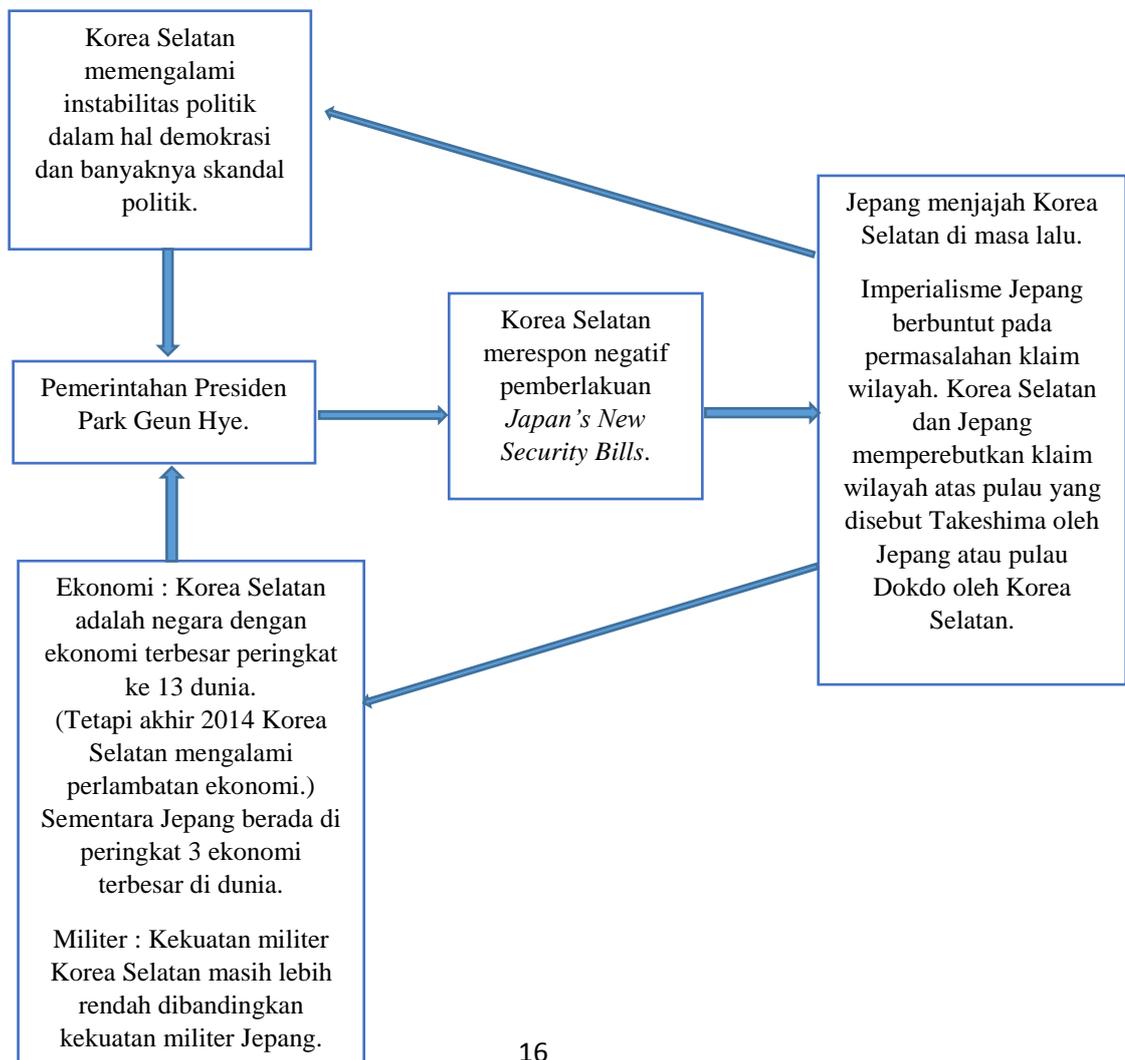
<sup>23</sup> Kim Keesok, January 14 2015, "Democracy is the biggest challenge for South Korea in 2015," East Asia Forum dalam <http://www.eastasiaforum.org/2015/01/14/democracy-is-the-biggest-challenge-for-south-korea-in-2015/> Diakses pada 20 November 2016

<sup>24</sup> Alexandra Dumitru, March 18 2016, "Korea Still Going Strong," RaboResearch Global Economics dalam <https://economics.rabobank.com/publications/2016/march/south-korea-still-going-strong/> Diakses pada 20 November 2016

Korea Selatan berbuntut pada klaim wilayah yang dilakukan kedua negara. Saat ini Korea selatan dan Jepang masih memiliki isu perebutanklaim atas pulau yang disebut Takeshima di Jepang dan Dokdo di Korea Selatan. Pertengkaran mungkin tampak kecil, terutama yang melibatkan kontrol perairan nelayan, tetapi hal tersebut berpengaruh besar terhadap hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pengaplikasian konsep diatas, penulis membuat bagan ilustrasi aplikasi proses pengambilan keputusan luar negeri Korea Selatan terhadap isu *Japan's New Security Bills*, sebagai berikut.

**Bagan II. Ilustrasi Aplikasi Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terhadap Isu *Japan's New Security Bills***



#### **D. Hipotesa**

Dengan mengaitkan pokok permasalahan yakni pertanyaan mengenai mengapa Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills* dengan dasar pemikiran diatas. Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills* Karena Korea Selatan mengalami instabilitas politik domestik terutama dalam hal demokrasi. Ketidakstabilan politik ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pemberlakuan *Japan's New Security Bills* akan mempengaruhi *National Security* Korea Selatan. Serta akan mengakibatkan Jepang melakukan intervensi dan bersikap agresif pada setiap konflik di wilayah regional Asia Timur, termasuk didalamnya berpengaruh terhadap perebutan klaim pulau Takeshima/Dokdo oleh Jepang.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan atau faktor-faktor dominan yang mendorong Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*. Disamping itu dengan penelitian ini penulis mengharapkan agar masyarakat internasional khususnya di wilayah Asia untuk lebih memperhatikan isu keamanan di Asia, sehingga nantinya masyarakat internasional khususnya di wilayah Asia akan lebih termotivasi untuk lebih berkontribusi pada perdamaian dan keamanan dunia.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan dari penelitian ini dibatasi pada isu *Japan's New Security Bills*, dan Korea Selatan sebagai representatif negara di wilayah Asia Timur yang merespon terhadap isu tersebut. Penelitian ini akan berfokus pada alasan Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills* yang

dipengaruhi kondisi politik domestik, kemampuan ekonomi dan militer Korea Selatan hingga konteks internasional yang mempengaruhi perilaku Korea Selatan dalam memutuskan kebijakan luar negerinya yang akan dijelaskan melalui dinamika militer Jepang dan isu *Japan's New Security Bills*, kondisi politik Korea Selatan yang dilengkapi hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang yang dipengaruhi sejarah masa lalu yaitu imperialisme Jepang di Semenanjung Korea, hingga respon Korea Selatan terhadap isu tersebut. Adapaun batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari sejak munculnya isu *Japan's New Security Bills* pada tahun 2014, kemudian kemunculan berbagai respon dari Korea Selatan hingga awal tahun 2016.

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode ekplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan alasan Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*. Metode ini merupakan pencarian fakta dengan tujuan membuat gambaran yang sistematis, aktual dan akurat dalam meneliti fenomena yang terjadi.

### **b. Sumber Data**

Penulis mengambil sumber penelitian dari data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, berita, dan website resmi.

### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan menelaah sejumlah

literatur baik berupa buku, jurnal, dokumen, artikel, dan makalah. Selain itu penulis mengumpulkan data dari berbagai *website* resmi, dan berita yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

#### d. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data, data-data sekunder yang penulis dapat digabungkan secara sistematis dan logis sesuai kebutuhan isu yang diteliti. Teknik analisa data yang penulis gunakan bersifat kualitatif, di mana data yang penulis dapatkan bukan berbentuk angka, melainkan melalui faktor-faktor yang relevan dengan topik penelitian.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari, Bab I yang berisi latar belakang, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian Bab II, berisi penjelasan mengenai dinamika militer Jepang termasuk mengenai perubahan struktur militer Jepang. Kemudian kebijakan *Japan's New Security Bills*, dimulai dari proses pengajuan hingga pengesahan di parlemen, faktor pendorong diberlakukannya *Japan's New Security Bills* hingga respon nasional mengenai pemberlakuan Undang-undang ini.

Dilanjutkan dengan Bab III akan menjelaskan secara umum politik luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang dan hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan yang masih dibayangi sejarah masa lalu serta implikasi *Japan's New Security Bills* terhadap hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang.

Bab IV berisi penjelasan mengenai bentuk respon yang diberikan pemerintah Korea Selatan dan hal-hal yang menjadi alasan Korea Selatan merespon negatif *Japan's New Security Bills* seperti kondisi politik domestik Korea Selatan yang mengalami instabilitas politik dalam hal demokrasi akibat banyaknya skandal politik dalam pemerintahan Presiden Park Geun-Hye. Kemampuan ekonomi dan militer Korea Selatan yang masih dibawah Jepang. Serta masih terdapat *national insecurity* akibat trauma mendalam terhadap sejarah masa lalu imperialisme Jepang di semenanjung Korea, juga pengaruh *Japan's New Security Bills* pada persengketaan Pulau Dokdo/Takeshima.

Dan terakhir yaitu Bab V yang berisi pemaparan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya sebagai bentuk penegasan atas penelitian ini.